

BAB II

ISU PENDIDIKAN DI JEPANG

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai isu pendidikan yang ada di Jepang terutama mengenai sistem pendidikan di Jepang dan program kebijakan bantuan dana pendidikan bagi sekolah menengah atas. Setiap negara tentu menyadari bagaimana pentingnya pendidikan bagi pembangunan negaranya. Aktor terkecil dalam suatu negara adalah individu sehingga kualitas dari individu di setiap negara sangat menentukan bagaimana arah kehidupan dan pembangunan dalam negara tersebut. Kualitas dari individu tersebut harus didukung dengan pendidikan yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Individu yang berpendidikan tinggi tidak hanya mempengaruhi bagaimana pola pikir dan ketepatan dalam memecahkan masalah ketika mereka berada di dalam institusi politik dan pemerintahan, namun dalam lingkup ekonomi mereka menjadi pekerja handal yang memiliki *skill* dan kemampuan yang mampu menjalankan perekonomian bangsa serta menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang baik di tingkat sosial.

A. Sistem Pendidikan di Jepang

Jepang yang terletak di wilayah Asia Timur merupakan negara yang berhasil bangkit dari keterpurukan akibat mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945). Keberhasilan bangkitnya “Negeri Sakura” ini dari keterpurukan tersebut salah satunya adalah berkat peran penting dari kualitas

pendidikan negaranya yang akhirnya membuat Jepang mengalami modernisasi yang pesat dan menjadi negara dengan perekonomian yang kuat di Asia Timur. Meskipun negara Jepang tidak begitu kaya dengan Sumber Daya Alam, namun Jepang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang dapat menyokong modernisasi, perkembangan teknologi, dan pembangunan ekonomi.

Jepang adalah negara yang menganut ajaran konfusianisme yang merupakan suatu perangkat kepercayaan yang menekankan tentang harmoni, stabilitas, dan konsensus (musyawarah mufakat) serta menekankan pada hirarki dan pemimpin mendapat mandat dari Tuhan. Salah satu nilai yang terkandung di dalam ajaran tersebut adalah sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan. Pemerintah Jepang memberikan perhatian serius terhadap pendidikan agar semua siswa dapat memperoleh pendidikan yang sama. Selain menjunjung tinggi nilai pendidikan, ajaran ini juga menjunjung nilai meritokrasi yaitu seseorang dapat memperoleh kesempatan atau kedudukan asalkan orang tersebut menunjukkan kualitas diri dan memberikan kontribusi.

Nilai meritokrasi tidak hanya diterapkan dalam jalannya pemerintahan di Jepang. Pemerintahan di Jepang berdasarkan pada merit atau balas jasa di mana yang memerintah dan mempunyai kedudukan adalah seseorang yang sudah memberikan kontribusi terhadap jalannya perpolitikan di negara tersebut. Nilai meritokrasi juga diterapkan dalam bidang pendidikan. Individu yang berprestasi dan berintelektual tinggi dengan menunjukkan hasil yang memuaskan dalam setiap ujian akan mendapatkan kesempatan yang luas dalam pekerjaan maupun adanya pengakuan dari masyarakat. Prestasi yang cemerlang dan intelektualitas individu

dipandang sebagai hasil dari kerja keras. Sehingga setiap siswa akan belajar dengan giat dan mengambil kelas tambahan jika diperlukan dengan dukungan dari orangtua dan guru mereka.

Sikap individu yang berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan mengharapkan kesempatan yang luas di berbagai bidang akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun hal tersebut juga perlu didukung oleh kurikulum yang sesuai yang diajarkan di sekolah. Presiden *Japan Comparative Education Society*, Yutaka Otsuka menyampaikan bahwa pembinaan karakter merupakan salah satu hal yang ditonjolkan dalam sistem pendidikan di Jepang. Selain itu, prioritas utama dalam pendidikan modern di Jepang saat ini adalah tercapainya keharmonisan antara sikap pribadi siswa dan kemampuan mereka untuk bekerjasama dengan orang lain.¹

Jepang sebagai salah satu Negara maju di dunia, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yang dapat dilihat berdasarkan data dari *United Nations Development Programme : Human Development Reports* pada tanggal 15 November 2013 yang menunjukkan bahwa Jepang menempati ranking 17 dari 187 negara berdasarkan index pendidikannya dengan nilai 0,890.² Selain itu, berdasarkan data dari *Central Intelligence Agency* pada tahun 2002 bahwa 99% populasi warga Jepang (127.103.388 orang pada tahun 2014) baik perempuan maupun laki-laki mulai dari usia 15 tahun dan seterusnya dapat membaca dan

¹ Margaret Puspitarini, "Belajar dari Sistem Pendidikan Jepang," Okezone, <http://news.okezone.com/read/2012/10/01/373/697406/belajar-dari-sistem-pendidikan-jepang> (diakses pada 20 November 2014).

² United Nations Development Programme : Human Development Reports, "Education Index," United Nations Development Program, <http://hdr.undp.org/en/content/education-index> (diakses pada 6 Desember 2014).

menulis.³ Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 1% warga Jepang yang masih mengalami buta huruf.

Kesadaran akan pendidikan yang tinggi juga dimiliki oleh Negara Jepang di mana 3,8% dari GDP (Gross Domestic Product) dianggarkan untuk biaya pendidikan berdasarkan data tahun 2011 dari *Central Intelligence Agency*.⁴ Pendapatan perkapita Jepang meningkat setiap tahunnya dengan total \$35.600 pada tahun 2011, \$36.300 pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 adalah sebesar \$37.100 yang menempati peringkat ke-36 di dunia.⁵ Ekspektasi untuk menempuh pendidikan mulai dari primer hingga tersier dilakukan selama total 15 tahun baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam data pada tahun 2011.⁶

Pada dasarnya Sistem Pendidikan di Jepang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 tahun, Perguruan Tinggi (Universitas) 4 tahun (untuk Program Diploma atau Sekolah Tinggi lainnya 2 tahun). Sebagai Program Wajib Belajar maka semua anak harus masuk dan menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Program Wajib Belajar ini adalah kewajiban bagi warga negara Jepang, akan tetapi jika anak-anak warga negara asing yang tinggal di Jepang dan berumur antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun berkeinginan masuk sekolah, tanpa mempermasalahkan kewarganegaraan anak-

³ Central Intelligence Agency, "People and Society : Japan," Central Intelligence Agency Website, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html> (diakses pada 10 Desember 2014).

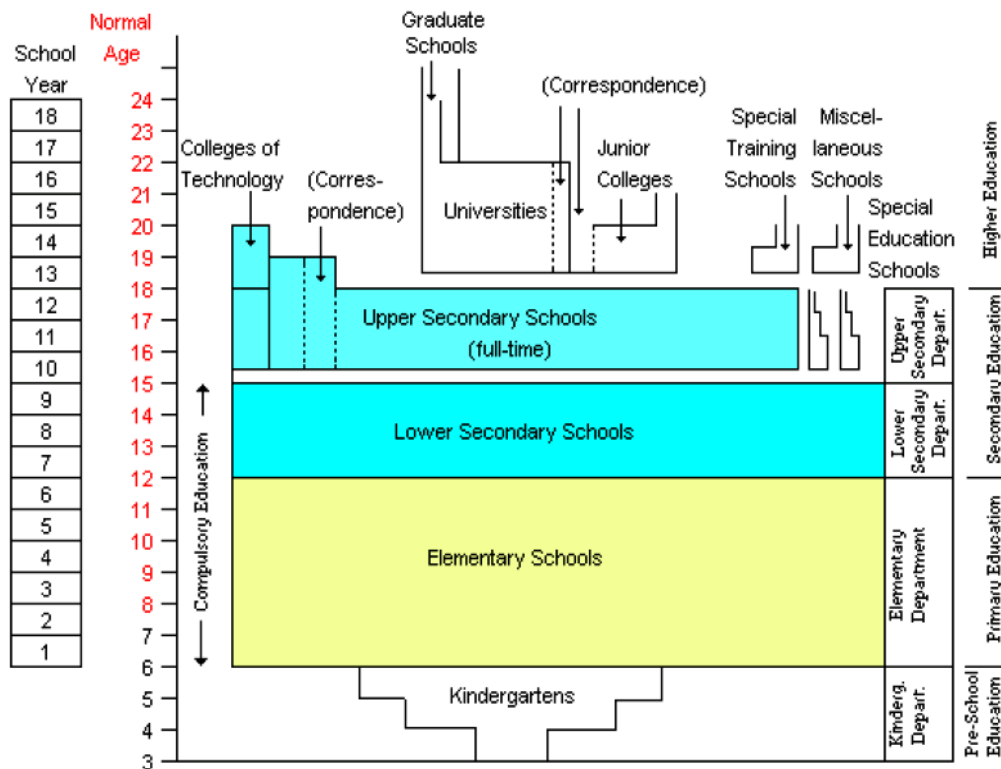
⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

anak tersebut dapat masuk dan pindah ke Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Jepang dengan beban biaya sekolah yang sama dengan orang Jepang.⁷

Gambar 2.1 Struktur dari Sistem Pendidikan di Jepang



Sumber : International Bureau of Education of UNESCO, “Japan,”

World Data on Education, 6th edition (2006): 10.

Gambar di atas menunjukkan struktur dari sistem pendidikan di Jepang berdasarkan usia siswa dan tahap pendidikan yang ditempuh. Tahap pendidikan tersebut terdiri dari Pendidikan pra-sekolah (*Pre-school education*), Pendidikan

⁷ Yayasan (Kepentingan Umum) Asosiasi Internasional Niigata, “Penjelasan Tentang Sekolah Di Jepang : Proses Melanjutkan Ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lain-lain,” Yayasan Asosiasi Internasional Niigata Website, [http://www.niigata-ia.or.jp/jp/ct/004_siryu/001_siryu/gakusyusien/01/ind\[2014\].pdf](http://www.niigata-ia.or.jp/jp/ct/004_siryu/001_siryu/gakusyusien/01/ind[2014].pdf) (diakses pada 1 Januari 2015).

dasar (*Primary education*), Pendidikan menengah (*Secondary education*) dan Pendidikan tinggi (*Higher education*). Pendidikan pra-sekolah adalah Taman Kanak-kanak dengan siswa berumur 3-6 tahun. Sekolah ini tidak wajib dan sebagian besar disediakan oleh institusi swasta. Pendidikan dasar adalah tahap pertama dari wajib belajar di mana semua anak berusia 6-12 tahun dapat menduduki sekolah dasar. Hampir semua anak (98,6%) masuk ke sekolah dasar negeri yang di dukung oleh pemerintah lokal.⁸

Pendidikan menengah terdiri dari Pendidikan tingkat pertama (*lower education*) dan Pendidikan tingkat atas (*upper education*). Pendidikan tingkat pertama yang terdiri dari sekolah menengah pertama merupakan tahap akhir dari wajib belajar dengan siswa pada usia 12-15 tahun. Pendidikan tingkat atas pertama kali dibentuk pada tahun 1948 yang tidak termasuk dalam wajib belajar dan terdiri dari tiga jenis yaitu sekolah satu hari penuh (*full-time*), sekolah setengah hari (*part-time*), dan kursus yang menyesuaikan waktu belajar. Sekolah menengah dalam tahap ini dibagi lagi menjadi tiga yaitu sekolah menengah umum yang menekankan aspek akademik, sekolah menengah khusus untuk kejuruan atau teknik, dan sekolah menengah terintegrasi yang menggabungkan umum dan khusus secara komprehensif. Tahap terakhir dalam struktur dari sistem pendidikan Jepang adalah Pendidikan tinggi yang meliputi Universitas (*daigaku*), Akademi (*junior colleges/tanki daigaku*), dan Perguruan tinggi teknologi (*colleges of technology/koto-senmongakko*).⁹

⁸ International Bureau of Education of UNESCO, "Japan," World Data on Education, 6th edition (2006): 10.

⁹ *Ibid*, hal. 11.

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) berperan penting dalam kualitas pendidikan di Jepang. MEXT menyusun kurikulum dengan masukan dari *The Central Council for Education*. Kurikulum tersebut menuntut kedisiplinan dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Siswa diharapkan dapat memahami alasan mengapa sesuatu terjadi, bukan hanya mengikuti prosedur yang ada sehingga mereka dapat menerapkannya dalam konteks yang mereka tidak pahami sekalipun.¹⁰ Pedoman kurikulum yang disusun oleh MEXT bagi Taman Kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah tingkat pertama dan tingkat atas disebut dengan *Courses of Study*.¹¹

Pendidikan pra-sekolah bertujuan untuk membantu mengembangkan pikiran dan tubuh anak dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dengan jam sekolah 4 jam per hari melalui permainan. *The Course of Study for Kindergartens* yang diterapkan pada tahun 1990 memiliki tujuan untuk membangun perasaan anak (*emotions*), kesediaan anak (*willingness*), dan mendidik anak bersikap (*attitudes*) serta untuk meraih setiap konten yang diajarkan yang terdiri dari lima aspek yaitu kesehatan, hubungan sesama manusia, lingkungan, bahasa, dan ekspresi.¹² Pendidikan dasar bertujuan untuk menyediakan pendidikan dasar yang sesuai dengan pertumbuhan mental dan fisik anak.¹³

¹⁰ The Center on International Education Benchmarking, "Japan Overview," The Center on International Education Benchmarking, <http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/> (diakses pada 10 Desember 2014).

¹¹ International Bureau of Education of UNESCO, Japan, Op.Cit, hal. 14.

¹² Ibid, hal. 15.

¹³ Ibid.

Pendidikan menengah terdiri menjadi dua yaitu Pendidikan tingkat pertama dan Pendidikan tingkat atas. Pendidikan tingkat pertama bertujuan untuk menyediakan pendidikan umum yang sesuai dengan mental dan fisik anak berdasarkan dengan pendidikan di sekolah dasar.¹⁴ Sedangkan Pendidikan tingkat atas bertujuan untuk memberikan siswa lulusan pendidikan tingkat pertama mengenai pendidikan umum dan khusus bagi perkembangan mental dan fisik berdasarkan pada pendidikan di sekolah menengah pertama. Pendidikan tingkat atas menawarkan berbagai pilihan mata pelajaran di mana kurikulum di setiap sekolah mengadaptasi tujuan dari dari pelajaran yang ditawarkan di sekolah tersebut (apakah sekolah menengah umum atau khusus). Kemudian akan diferensiasi sesuai dengan kemampuan, bakat, dan prospek ke depan dari setiap individu agar siswa dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan ketiga hal tersebut.¹⁵

Hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah menyediakan semua buku pelajaran. Kemudian *The School Education Law* yang diterapkan pada tahun 1947 memuat tentang sistem pemberlakuan buku pelajaran. Dalam sistem ini, penerbit non-pemerintah membuat buku pelajaran dan mengumpulkannya untuk diperiksa secara ofisial dan disetujui oleh *Ministry of Education*. Buku yang diajukan harus memenuhi persyaratan berdasarkan dengan pedoman kurikulum yang merupakan aturan standar kurikulum bagi sekolah Jepang. Namun, penerbit dapat menambahkan metode belajar mereka ke dalam bahan ajar.

¹⁴ Ibid, hal. 17.

¹⁵ Ibid, hal. 19.

Proses pembuatan hingga disetujui buku pelajaran tersebut dimulai dengan penerbit mengumpulkan tim akademik dan guru yang kemudian mereka akan menulis buku pelajaran, melakukan diskusi pada materi atau isi buku pelajaran dan melakukan proses pengeditan. Setelah buku selesai disusun, penerbit mengumpulkan sampel buku tersebut kepada *Ministry of Education*. Kemudian *Textbook Approval Research Council* memeriksa bacaan sesuai dengan *Textbook Examination Standards*. Berdasarkan rekomendasi dari dewan tersebut, *Ministry of Education* mengajukan bagian yang tidak sesuai untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya penerbit akan mengumpulkan kembali hasil perbaikan mereka dan jika dewan setuju, maka buku pelajaran tersebut akan direkomendasikan sebagai buku yang sesuai. Rekomendasi ini diikuti dengan persetujuan dari *Ministry of Education*. Buku pelajaran yang telah disetujui oleh *Ministry of Education* ditampilkan pada masyarakat lokal untuk dinilai secara publik. Keputusan akhir yang menentukan buku pelajaran mana yang akan digunakan diserahkan pada dewan pendidikan lokal untuk sekolah negeri, dan sekolah itu sendiri untuk institusi swasta. Ketika sekolah telah membuat keputusan, maka mereka menghubungi penerbit yang selanjutnya penerbit akan melakukan proses pencetakan dan distribusi.¹⁶

Pemerintah Jepang menanggung biaya buku pelajaran bagi semua siswa di sekolah nasional, negeri dan swasta pada sekolah dalam tingkatan wajib belajar (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, tiga tahun pertama di sekolah yang

¹⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Japan's School Textbook Examination Procedure," Ministry of Foreign Affairs of Japan, <http://www.mofa.go.jp/policy/education/textbooks/> (diakses pada 26 Desember 2014).

berintegrasi dengan sekolah menengah atas, dan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama untuk penderita kebutaan, tuli, dan keterbelakangan).¹⁷

B. Program “Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund”

Program *Free Tuition at Public High Schools and the High School Enrollment Support Fund* merupakan program yang dibuat pada tanggal 31 Maret tahun 2010 dan diterapkan pada tanggal 1 April 2010. Program ini berisi mengenai biaya sekolah gratis bagi sekolah negeri dan bantuan biaya untuk pembayaran sekolah bagi siswa-siswa di sekolah swasta yang mengajukannya. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi biaya pendidikan bagi orangtua murid dan memperbesar kesetaraan kesempatan untuk menempuh pendidikan di *upper secondary*.¹⁸ Dalam program kebijakan ini, tidak hanya sekolah Jepang saja yang dapat menerima bantuan dana pendidikan tetapi juga berbagai sekolah asing yang diakui oleh *Japanese Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology* dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*.¹⁹

¹⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan, “How a Textbook Becomes Part of a School Curriculum,” Ministry of Foreign Affairs of Japan, <http://www.mofa.go.jp/policy/education/textbooks/overview-1.html> (diakses pada 26 Desember 2014).

¹⁸ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, “Free tuition fee at public high schools/High school enrollment support fund system,” Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, <http://www.mext.go.jp/english/elsec/1303524.htm> (diakses pada 25 Desember 2014).

¹⁹ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, “Feature2 Making Public High Schools Tuition-Free and High School Enrollment Subsidies,” Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/detail/1305888.htm (diakses pada 25 Desember 2014).

1. Latar Belakang Program

Latar belakang program ini dibuat adalah dikarenakan saat ini hampir 98% remaja menuntut ilmu di sekolah menengah atas atau sederajat. Wajib belajar memang ditentukan dari SD hingga ke SMP, namun banyak siswa yang melanjutkan pendidikan mereka hingga ke jenjang sekolah menengah atas karena lebih banyak kesempatan kerja yang tersedia bagi lulusan SMA dan mereka dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu mengikuti seleksi masuk ke Perguruan Tinggi atau program diploma. Sekolah menengah atas telah menjadi institusi pendidikan nasional dengan manfaat yang didapatkan di dalamnya secara luas berpengaruh terhadap masyarakat. Program bantuan dana pendidikan bagi sekolah menengah atas diluncurkan dengan tujuan untuk memfasilitasi perjuangan masyarakat luas dalam mendukung kesempatan semua orang untuk menempuh pendidikan dan membantu sesama. Program ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk merasa aman dan belajar dengan tekun tanpa harus mengkhawatirkan biaya pendidikan. Diharapkan siswa yang mendapat manfaat dari program ini dengan masuk dan belajar di sekolah menengah atas akan dapat bersaing baik secara domestik maupun secara global.²⁰

Program ini diaplikasikan bagi beberapa tipe sekolah yaitu sekolah nasional dan sekolah swasta yang terdiri dari : sekolah menengah (*latter course*), sekolah dengan kebutuhan pendidikan khusus (*upper secondary school department*), perguruan tinggi teknologi (siswa tahun pertama sampai ketiga), *specialized training colleges*; dan *miscellaneous schools* yang diakui oleh *The*

²⁰ Ibid.

Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology sebagai sekolah sederajat yang mengajarkan kurikulum yang sama dengan sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas ini meliputi *full-day, day/evening* dan kurikulum yang sesuai atau sama. Bagi *miscellaneous international schools* di Jepang, kurikulum yang digunakan didesain oleh *Japanese Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology* dan harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh *the Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*.²¹

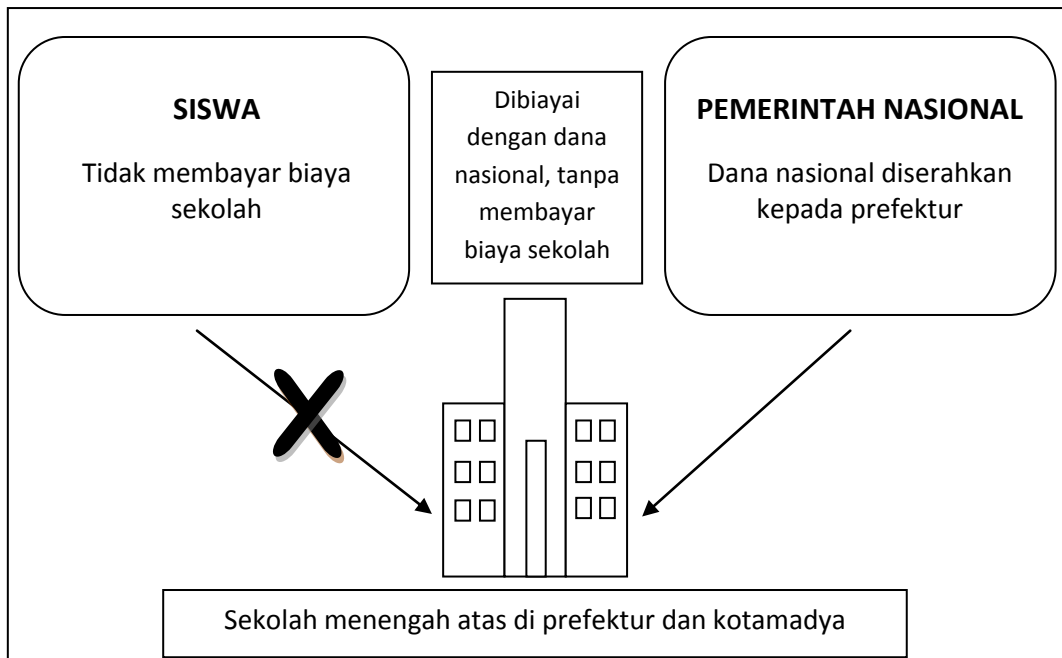
2. Program *Free Tuition Fee at Public High Schools*

Tujuan dari program biaya sekolah gratis bagi sekolah menengah atas negeri ini adalah untuk membangun masyarakat yang di mana setiap siswa dapat berkonsentrasi untuk belajar tanpa harus mengkhawatirkan biaya pendidikan mereka. Pendapatan nasional digunakan untuk membayar biaya di sekolah menengah atas negeri tersebut sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keuangan keluarga siswa. Bantuan biaya ini meliputi biaya sekolah pokok diluar dari biaya pendidikan lain seperti biaya martikulasi, buku pelajaran, dan biaya perjalanan kelas. Siswa ataupun wali murid tidak perlu untuk mengisi formulir tertentu demi untuk mendaftar dalam program ini.²²

²¹ Ibid.

²² Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, "Overview of Free tuition fee at public high schools," Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.html, (diakses pada 25 Desember 2014).

Gambar 2.2 Alur Program *Free Tuition Fee at Public High Schools*



Sumber : http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.html

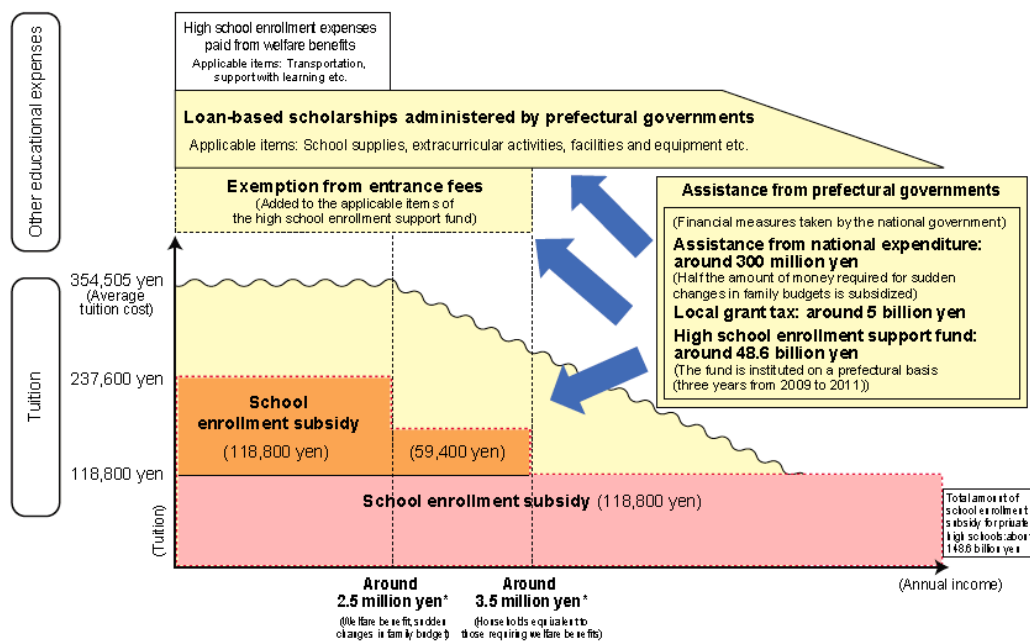
Berdasarkan dari gambar tersebut, Sekolah negeri termasuk sekolah menengah (*latter course*) dan sekolah dengan kebutuhan pendidikan khusus (*upper secondary school department*) tidak diizinkan untuk mengumpulkan atau memungut biaya sekolah dari siswa. Jadi pada prinsipnya sekolah menengah atas negeri tidak mengharuskan untuk memungut biaya sekolah. Pemerintah nasional telah mensubsidi biaya yang dibutuhkan untuk *local public organizations*. *Local public organizations* akan menerima sejumlah uang yang setara dengan kebutuhan biaya sekolah yang seharusnya dari pendapatan nasional.

3. Program *High School Enrollment Support Fund*

Membantu siswa agar dapat belajar dengan rajin tanpa harus mengkhawatirkan biaya sekolah merupakan tujuan dari program bantuan dana

pendidikan bagi sekolah menengah atas ini. Bantuan dana pendidikan ini telah dibuat untuk mengurangi pengeluaran orangtua siswa baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, dan lain-lain. Bantuan biaya pendidikan tersebut sebesar 9.900 yen per bulannya (118.800 yen per tahun) bagi setiap siswa dan dapat bertambah tergantung dari keadaan perekonomian keluarga siswa. Keluarga siswa dengan pemasukan rata-rata 2,5 juta yen per tahun mendapat bantuan sebesar 9.900 yen per bulan (118.800 per tahun), sedangkan keluarga siswa dengan pemasukan rata-rata 2,5-3,5 juta yen per tahun akan mendapat bantuan sebesar 4.950 yen per bulan (59.400 per tahun). Biaya pendidikan lain seperti biaya martikulasi, buku pelajaran, dan biaya perjalanan kelas tidak dibiayai.²³

Gambar 2.3 Bantuan Dana Pendidikan Bagi Siswa



Sumber : http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/detail/1305888.htm

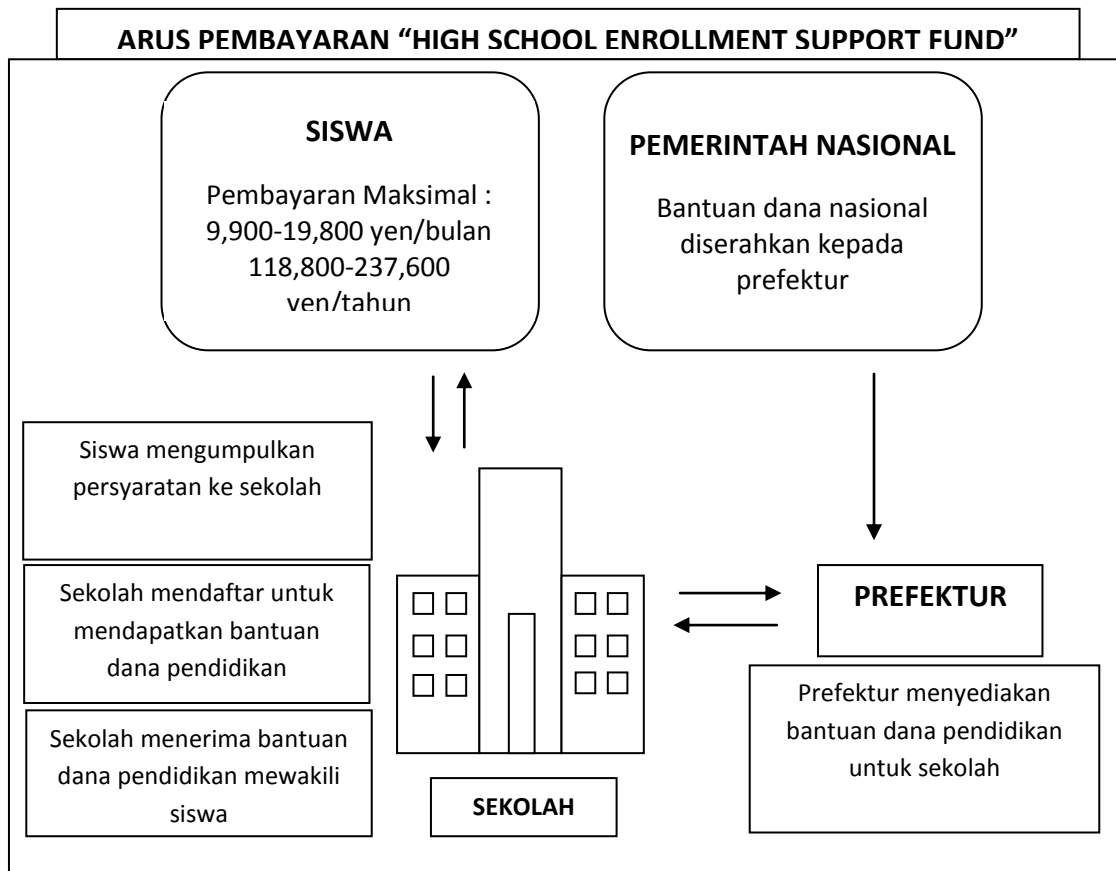
²³ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, "Overview of High school enrollment support fund system," Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.html, (diakses pada 25 Desember 2014).

Untuk memperoleh bantuan pendidikan dalam program ini, siswa harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Siswa bersekolah di sekolah negeri maupun swasta (baik *full-time*, *part-time*, dan memiliki kesamaan kurikulum) atau beberapa sekolah yaitu *upper secondary education* pada sekolah *secondary* negeri atau swasta, *upper secondary departments* dari sekolah negeri atau swasta dengan kebutuhan pendidikan khusus, perguruan tinggi teknologi (siswa tahun pertama sampai ketiga saja), sekolah kejuruan, *specialized training colleges*, dan *miscellaneous schools*. Tentunya semua sekolah yang telah disebutkan di atas tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *The Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*.²⁴
- b. Siswa mengisi formulir yang dikumpulkan melalui sekolah di mana harus ada bukti yang menunjukkan pendapatan orangtua.

²⁴ Ibid.

Gambar 2.4 Alur Program *High School Enrollment Support Fund*



Sumber : http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.html

Berdasarkan gambar di atas, sekolah dapat mengajukan untuk mendapat bantuan dana pendidikan tersebut. Jika yang diajukan telah diterima, sekolah menerima uang bantuan tersebut atas nama siswa atau orang tua siswa dan menggunakannya sebagai pengganti biaya sekolah, sehingga beban keuangan bagi siswa dan orang tua untuk biaya sekolah dapat berkurang. Di tambah dengan dukungan dari pemerintah nasional, pemerintah prefektur juga meningkatkan bantuan yang telah mereka tawarkan hingga kini.

4. Sumber Dana Bantuan Pendidikan

Berdasarkan penjelasan dari International Bureau of Education of UNESCO²⁵, pembiayaan pendidikan di Jepang dibagi antara pemerintah nasional, prefektur dan kota yang masing-masing menyediakan bantuan untuk aktifitas pendidikan. Anggaran untuk pendidikan tersebut berasal dari pajak dan pendapatan lainnya. Anggaran pendidikan dari pemerintah nasional terbagi menjadi dua kategori yaitu :

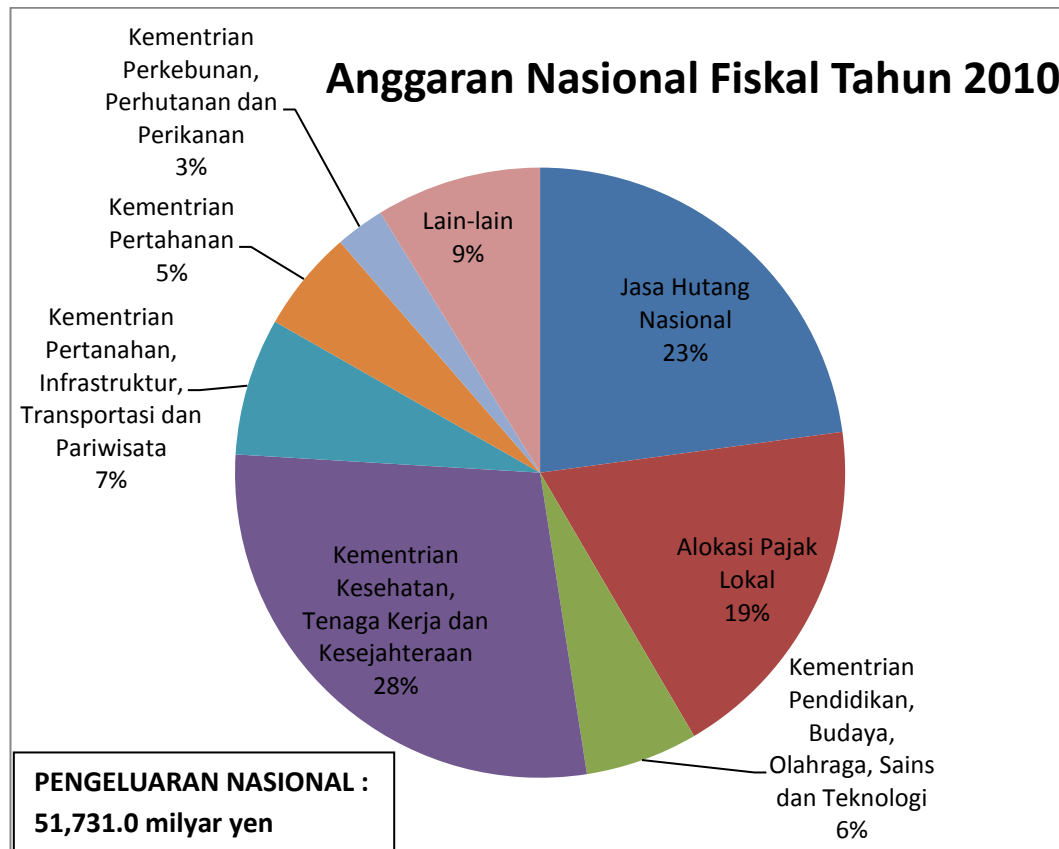
- a) Anggaran untuk pembangunan pendidikan nasional (Universitas, dan lain-lain) serta jasa.
- b) Anggaran yang berhubungan dengan kontribusi dan subsidi yang diperuntukan untuk pendidikan yang dialokasikan bagi prefektur, kota, pembangunan pendidikan swasta, dan lain-lain.

Pemerintah nasional menyediakan dana “*Local Allocation Tax*” untuk pemerintah prefektur dan kota. Sumber dana ini berdasarkan pada peraturan yang ada yaitu persentase total pendapatan nasional dari pajak korporasi dan *liquor* sebesar 32%, pajak konsumsi sebesar 24%, dan pajak rokok sebesar 25%. Disisi lain, pemerintah prefektur memberikan anggaran pendidikan meliputi anggaran untuk pembangunan dan jasa pendidikan prefektur, gaji dan tunjangan guru di *Elementary, lower secondary, dan part-time upper secondary school* di tingkat kota, serta subsidi untuk tujuan pendidikan di tingkat kota. Sedangkan anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota meliputi anggaran operasional

²⁵ International Bureau of Education of UNESCO, Japan, Op.Cit, hal. 13.

untuk *elementary* dan *lower secondary school* (selain gaji guru) dan anggaran operasional untuk pembangunan pendidikan di tingkat kota dan lainnya.

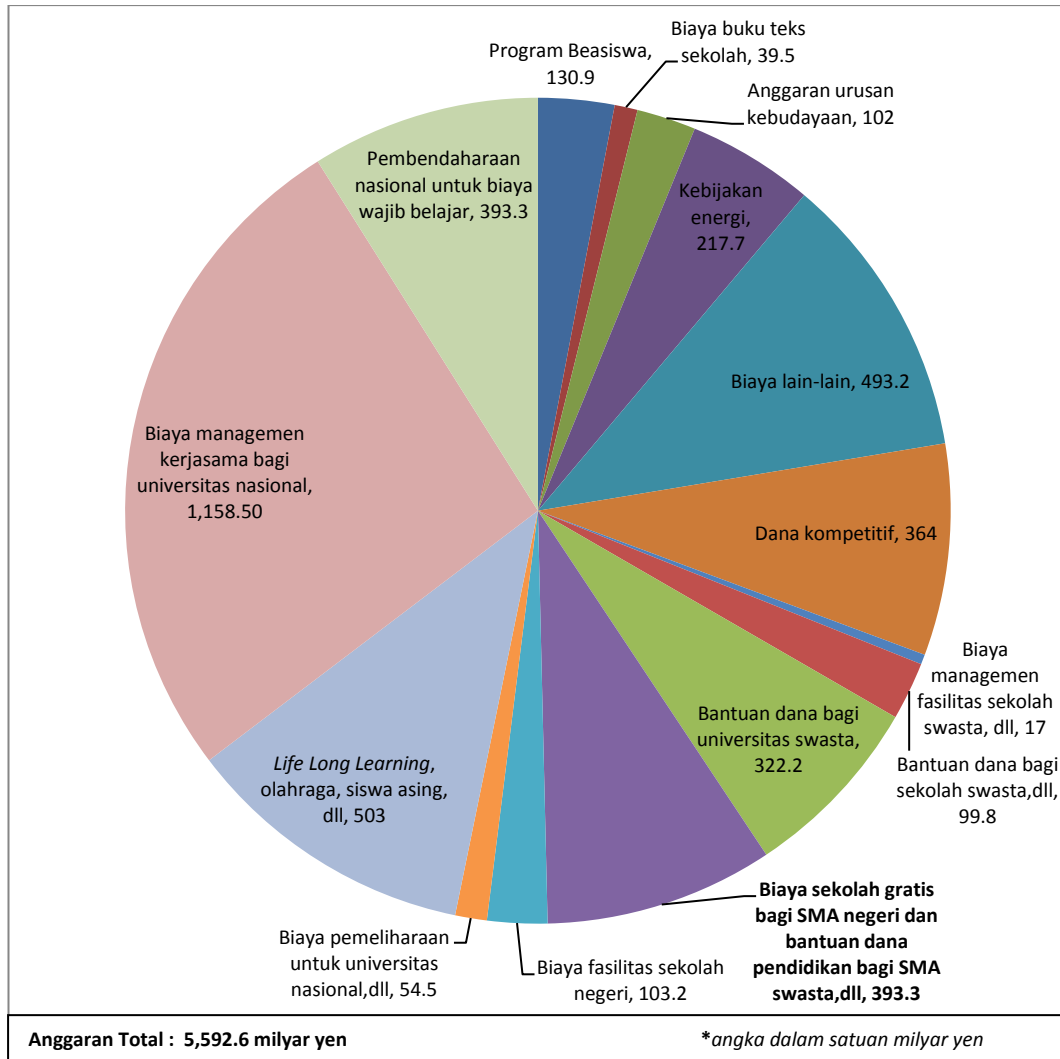
Diagram 2.1 Anggaran Nasional Fiskal Tahun 2010



Sumber : <http://www.mext.go.jp/english/budget/>

Gambar di atas memperlihatkan bahwa jumlah anggaran bagi MEXT pada tahun 2010 adalah sebesar 10,2% (5,281.7 milyar yen) dari pengeluaran nasional sejumlah 51,731.0 milyar yen. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk pendidikan lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk perkebunan, kehutanan dan perikanan serta pertahanan. Berikut gambar mengenai rincian penggunaan untuk pendidikan.

Diagram 2.2 Anggaran Nasional Fiskal MEXT Tahun 2010



Sumber : <http://www.mext.go.jp/english/budget/>

Gambar di atas menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrolment Support Fund* adalah sebesar 393,3 miliar yen yang merupakan 7% dari anggaran nasional.

Berdasarkan dari penjelasan di dalam bab ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Jepang memberikan perhatian yang serius mengenai pendidikan. Dalam sistem pendidikan Jepang, pemerintah berperan penting terutama dalam penyusunan kebijakan dan kurikulum dalam pembelajaran di sekolah mulai dari *Pre-Primary Education* sampai pada *Higher Education*. Pemerintah juga menyiapkan anggaran yang besar untuk menunjang pendidikan yang berasal dari pendapatan nasional di mana siswa tidak perlu membayar biaya sekolah untuk wajib belajar (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama). Sekolah Menengah Atas yang sudah bukan merupakan wajib belajar lagi juga mendapat bantuan biaya dari pemerintah. Bantuan ini disajikan dalam bentuk program *Free Tuition at Public High Schools and the High School Enrollment Support Fund* yang diterapkan pada tanggal 1 April 2010. Kebijakan ini berisi mengenai biaya sekolah gratis bagi sekolah negeri dan bantuan biaya untuk pembayaran sekolah bagi siswa-siswa di sekolah yang mengajukannya dengan tujuan untuk mengurangi biaya pendidikan bagi orangtua murid dan memperbesar kesetaraan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Sekolah asing yang berada di Jepang juga dapat mendapatkan bantuan dana pendidikan ini.